

## PENGENDALIAN COVID-19 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

# Zona Hijau Bertambah, Kasus Tak Kunjung Turun

**YOGYA (KR)** - Meski cakupan vaksinasi di Kota Yogya semakin luas, namun kasus Covid-19 tak kunjung turun. Sebaliknya, wilayah dengan kategori zona hijau justru terus bertambah. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menuturkan selama 9 minggu terakhir rata-rata pertambahan kasus Covid-19 mencapai 150 kasus tiap minggu.

"Kenapa kasusnya tak kunjung turun, mungkin akan lebih tepat jika kampus yang memberikan gambaran. Namun jika kita lihat, kecenderungan kasus sekarang ialah penularan dalam keluarga," paparnya, Senin (19/4).

Hal ini karena dari sisi vaksinasi yang sudah mencapai 90.000-an warga, menjadi upaya untuk mengurangi sebaran penularan di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, menunjukkan hasil positif di wilayah. Misal jumlah RT di Yogya yang masuk zona hijau kini mencapai 95,46 persen, sisanya 4,54 persen merupakan zona kuning. Sehingga tidak ada satu RT yang masuk zona oranye atau merah. Kemudian secara epidemiologi, ada 5 Kelurahan zona merah atau turun dari sebelumnya yang mencapai 9 Kelurahan.

"Artinya wilayah semakin menghijau dan kecenderungannya semakin baik.

Tetapi jika kita lihat jumlah kasus baru yang muncul, memang ada hal yang harus kita perhatikan. Sehingga potensi penyebab mengapa kasus mingguan tidak naik dan tidak turun, karena masih adanya kontak erat dalam keluarga," urai Heroe.

Oleh karena itu perlu tanggung jawab bersama untuk mengendalikan laju kasus. Apalagi setiap kerumunan di masyarakat rentan meningkatkan potensi penularan hingga berkembang di dalam keluarga. Maka, imbuhan Heroe, pihaknya akan perkuat pada monitoring di RT atau RW. Terutama monitoring potensi terjadinya kerumunan, dan aktivitas di masyarakat. Semakin sering interaksi dengan banyak orang, maka harus semakin mengurangi interaksi erat dengan keluarga, atau menjalankan prokes dengan ketat di dalam keluarga.

Di samping itu, pihaknya mengapresiasi kepada takmir masjid yang menyelenggarakan salat tarawih dengan pem-

batasan jumlah dan penerapan prokes yang tinggi, serta kesadaran masyarakat untuk tidak membentuk atau menghindari kerumunan. "Sebab jika abai dengan prokes dan tidak disiplin prokes maka yang terkena adalah anggota keluarganya," tandasnya.

Kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan pasar Ramadan juga sedang dilakukan. Laporan sementara banyak pasar Ramadan yang bisa menjalani prokes sehingga tidak terjadi kerumunan. Tetapi ada pasar Ramadan yang menjadi perhatian karena masih belum bisa mengatasi kerumunan. "Artinya meskipun panitia sudah mencoba, tetapi pada kenyataannya masih menimbulkan kerumunan. Maka perlu dievaluasi dan dilakukan pengetatan mekanisme dan caranya," katanya.

Dengan kata lain, pengetatan pasar Ramadan yang potensi menimbulkan kerumunan akan dilakukan. Di antaranya seperti pembatasan hari buka seminggu hanya tiga kali atau pembatasan jumlah pengunjung dengan dilakukan penutupan sejumlah arus jalan yang berakses pada kerumunan. Sehingga ada batas maksimal yang boleh masuk di area pasar Ramadan dengan pembatasan jumlah yang tidak menimbulkan kerumunan. (Dhi)-d

## Penyaluran Kredit Bank BPD DIY Tumbuh Positif



KR-Istimewa

Kantor Bank BPD DIY yang ada di Kawasan Malioboro.

**YOGYA (KR)** - Pandemi Covid-19 memberi pukulan bagi perekonomian, baik regional maupun nasional. Hampir seluruh sektor ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak kondusif tersebut Bank BPD DIY mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangannya. Buktinya pada triwulan I 2021 kinerja keuangan Bank BPD DIY menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan triwulan I 2020 (year on year).

"Penyaluran kredit Bank BPD DIY pada Triwulan I menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari total kredit yang telah disalurkan Bank BPD DIY hingga Maret 2021 mencapai Rp 9,01 triliun. Jumlah tersebut naik 6,47 persen (year on year) dibandingkan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar Rp 8,47 triliun," kata Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad di Yogyakarta, Senin (19/4).

Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020, menurutnya penyaluran kredit Bank BPD DIY pada triwulan I 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 135,66 miliar atau tumbuh 1,53 persen.

Santoso mengatakan, pertumbuhan kredit Bank BPD DIY salah satunya ditopang oleh sektor UMKM yang terbukti memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Penyaluran kredit kepada sek-

tor UMKM mencapai 48,30 persen dari total penyaluran kredit produktif Bank BPD DIY dengan nilai sebesar Rp 2,076 triliun. Selain itu, kinerja keuangan Bank BPD DIY secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan I 2021.

"Tak hanya penyaluran kredit, kinerja keuangan lainnya juga menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2021," kata Santoso

Lebih lanjut Santoso menyampaikan, Bank BPD DIY mendapat kepercayaan dari Pemerintah dengan penempatan dana sebesar Rp1 triliun dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan suku bunga yang ringan. Hingga Maret 2021 Bank BPD DIY telah menyalurkan Kredit PEN sebesar Rp 2,44 triliun kepada 15.849 debitur. Dari jumlah tersebut 50 persen disalurkan kepada sektor produktif.

Pertumbuhan kredit Bank BPD DIY juga diikuti dengan peningkatan kualitas kredit. Hal tersebut terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang semakin menurun. Rasio NPL Gross Bank BPD DIY pada triwulan I 2021 sebesar 2,05 persen, lebih baik dari rasio NPL Gross akhir tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,14 persen. (Ria)-d

## Layanan Dukcapil Bakal Beralih ke JSS

**YOGYA (KR)** - Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) online seluruhnya akan beralih ke aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Akan tetapi untuk tahap awal peluncuran akan menjangkau layanan permohonan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akta kelahiran dan akta kematian.

Layanan dukcapil online yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya selama ini melalui WhatsApp (WA) khusus.

"Kalau melalui WA ini kan ada kuota harian. Tetapi jika nanti melalui JSS, berapapun permohonan yang masuk bisa kita penuhi. Namun rentang waktunya bisa kita informasikan lebih lanjut," urai Kepala Bidang Pelayanan Dindukcapil Kota Yogya Bram Prasetyo, Senin (19/4).

Sistem dukcapil online melalui JSS saat ini masih disempurnakan oleh

perangkat daerah lain yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Diharapkan akhir bulan ini sudah ada peluncuran, khususnya untuk empat jenis layanan yakni permohonan KTP, KIA, akta kelahiran dan akta kematian. Sementara untuk proses sosialisasi sudah dilakukan dua kali dengan sasaran petugas di 14 kemantren dan 45 Kelurahan. "Besok juga kita jadwalkan sosialisasi untuk petugas internal terutama bagi operator dinas," imbuhnya.

Bram menjelaskan, sejumlah administrasi kependudukan lainnya juga akan dimasukkan ke JSS jika sistem sudah siap. Terutama untuk layanan kartu keluarga (KK), surat keterangan tinggal sementara (SKTS) dan mutasi penduduk. Administrasi itu butuh persiapan panjang karena berkaitan dengan banyak aspek. Seperti KK baru diterbitkan jika hilang, rusak maupun ada

perubahan data yang di dalamnya terdapat banyak rumpun. Begitu pula SK-TS untuk pendataan proses penduduk nonpermanen, serta mutasi penduduk meliputi pindah datang dan pindah keluar.

Sementara bagi penduduk Kota Yogya yang belum memiliki aplikasi JSS, tidak perlu khawatir jika seluruh layanan sudah diberikan online. Warga tersebut bisa dibantu oleh petugas kemantren, Kelurahan atau warga lain yang memiliki aplikasi JSS. Hal ini karena layanan tersebut bisa dilakukan secara mandiri maupun dikuasakan.

Seluruh layanan dukcapil online tersebut untuk kepentingan permohonan baru. Sedangkan layanan pencetakan ulang seperti KTP yang hilang atau rusak, bisa tetap dilayani secara langsung melalui sistem drive thru di kompleks Balaikota setiap Senin hingga Kamis. (Dhi)-d

## Metode 'Compact' Masuk Kajian Dishub

**YOGYA (KR)** - Metode parkir *compact* masuk dalam kajian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya. Terutama untuk mengurai gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh parkir tepi jalan umum khusus sepeda motor.

Kepala Dishub Kota Yogya Agus Arif Nugroho, menjelaskan persoalan parkir tepi jalan umum memang cukup pelik. Satu sisi kapasitas jalan cukup terbatas sehingga limbah parkir kerap mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun di sisi lain ak-

tivitas ekonomi masyarakat juga bertumpu pada parkir tepi jalan. "Butuh metode khusus yang tanpa membutuhkan lahan luas namun kapasitasnya banyak. Salah satunya metode *compact* yang baru kami kaji," jelasnya, Senin (19/4).

Daerah yang sudah menerapkan metode parkir *compact* ialah Bandung, di salah satu tempat umum di sana. Persoalan parkir tepi jalan di Bandung juga hampir sama dengan di Kota Yogya yang lahannya cukup terbatas na-

mun aktivitas parkir tinggi. Studi banding ke kota tersebut pun sudah dilakukan pekan lalu.

Agus mengaku, salah satu rumah sakit di Kota Yogya yakni PKU Muhammadiyah juga sudah memulai pembangunan parkir *compact* untuk sepeda motor. Pihaknya pun mengapresiasi karena kelak bisa menjadi pioner bagi tempat lain. Harapannya parkir sepeda motor yang semula di Jalan KH Ahmad Dahlan, kelak sudah tidak ada lagi. (Dhi)-d

## AMC Ubah Status Jadi RSU Kelas D

**YOGYA (KR)** - ASRI Medical Centre (AMC) 'naik kelas' dari status sebagai Klinik Utama menjadi Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Kelas D. Perubahan status didasari Surat Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Surat Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit ini merupakan tahapan terakhir untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit.

Direktur Utama RS AMC Muhammadiyah dr Agus Widyatmoko SpPd MKes, Senin (19/4) mengemukakan, bahwa perubahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan. Karena dengan status klinik menurutnya tidak dapat dilakukan karena hanya bisa dilakukan di rumah sakit. "Selain itu, rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit satelit pendidikan yang akan mendukung pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)," ungkapnya.

Terpisah Direktur PT Asri Mandiri Berkemajuan (AMB) Prof Dr Sukanta selaku pengelola AMC menyebutkan untuk memenuhi hal itu, selama dua tahun telah dilakukan beberapa usaha untuk mendapatkan izin operasional. Di antaranya sebut Sukanta, adalah dengan melakukan renovasi dan penambahan fasilitas seperti bangsal dengan kapasitas 50 tempat tidur untuk rawat inap, ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sesuai dengan standar, kamar operasi, instalasi farmasi, laboratorium, CSSD, dan outpatient clinics atau layanan klinik rawat jalan, serta fasilitas

lainnya. "Kualitas sumber daya manusia meliputi dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga pendukung lainnya juga ditingkatkan kompetensinya. Selain itu, aspek lingkungan seperti instalasi

pengolahan limbah cair dan tempat pembuangan sampah medis juga disesuaikan dengan persyaratan yang ada," tambahnya. Fasilitas yang ada di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah dibangun dengan basis

teknologi IT. Seluruh sistem yang ada di rumah sakit, baik itu sistem antrian, appointment, layanan pasien, serta layanan antarunit akan menggunakan aplikasi sistem yang terintegrasi sedang dikembangkan. (Fsy)-d

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

## Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana Kota Yogya

**YOGYA (KR)** - Hingga periode awal tahun 2021 kejadian bencana yang melanda Indonesia hampir tidak pernah berhenti. Meski bencana itu tidak pernah diharapkan, namun Kota Yogya dinilai perlu melakukan penguatan sistem penanggulangan bencana. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi bencana yang beragam.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Subagyo, memaparkan bencana jangam hanya dilihat dari kejadian alam seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi dan lainnya. Melainkan juga bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 yang terjadi selama satu tahun lebih ini maupun bencana sosial. "Penguatan sistem ini tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Bagaimana masyarakat itu sigap dan tahu apa yang terjadi ketika mengalami kondisi bencana," ujarnya, Senin (19/4).

Sementara penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah merupakan penanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut.

Subagyo  
Fraksi PDI Perjuangan



KR-Ardhi Wahdan

Sedangkan sistem penanggulangan bencana, imbuhan Subagyo yang duduk di Komisi C ini, meliputi pola koordinasi yang digunakan dalam mengantisipasi maupun menanggapi saat terjadi bencana hingga dampak pas-bencana.

"Penguatan sistem penanggulangan bencana ini penting supaya jangam sampai terjadi timbul korban baik jiwa maupun materi," imbuhnya.

Khusus untuk bencana alam, diakuinya masyarakat dan pemerintah sudah cukup sigap dan bisa melakukan upaya mitigasi dengan baik. Akan tetapi untuk bencana nonalam, jangam sampai mengalami gugup seperti saat pertama kali wabah Covid-19 tahun 2020 silam. Begitu pula terhadap bencana sosial yang lebih cenderung pada perselisihan antar kelompok masyarakat.

"Bencana sosial selama ini tidak terekam dengan baik. Sehingga pendataan bencana sosial sulit untuk terdeteksi. Nah, sistem penanggulangan bencana harus mampu menjangkau alam, sosial dan lainnya," papar Subagyo.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah bisa terus membersamai masyarakat dalam berbagai kondisi yang terjadi. Begitu pula masyarakat, bisa tetap tangguh dan mandiri tanpa harus bergantung dari bantuan. (Dhi)-d

**PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**  
Jalan : KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Sleman, 55511  
Telp/Fax. (0274) 868401 | e-mail : pnsteman@yahoo.co.id  
SLEMAN

**PENGUMUMAN KEDUA**  
**LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA**  
No : 31/PDT.E/2018/PN.Smn.

Berdasarkan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2020 Nomor : 31/PDT.E/2018/PN.Smn. serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 30 Maret 2021, No : 5-922/WKN.09/KYL.05/2021, dengan ini PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1 Beran, Sleman, 555811, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) atas obyek sengketa perkara perdata Nomor : 31/Pdt.E/2018/PN.Smn., dalam perkara antara :

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CHANDRA MUKTIARTHA**  
sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

M e l a w a n

1. CECEP MUHAMAD ANAS
2. NY. SITI AFIFAH ERNA PRIHASTUTI, SARJANA AGAMA

..... sebagai TERMOHON EKSEKUSI

**Yaitu berupa :**  
Sebidang tanah tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri di atasnya beserta turutannya tanpa kecuali SHM No. 06763 Desa Condongcatur, Surat Ukur No. 00021/Condongcatur/98 Luas : 207 m<sup>2</sup>, tanggal penerbitan 22-05-1998 atas nama Siti Afifah Erna Prihastuti, SARJANA AGAMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bp. Suwito alm.
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang Ngadimem
- Sebelah Barat : Bp. Sadiyo
- Sebelah Timur : Siti Afifah Erna Prihastuti, SARJANA AGAMA.

Beralamat di : Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman

**Nilai Limit : Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)**  
**Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

**Yang akan dilaksanakan pada :**  
Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Mei 2020  
Batas Akhir Penawaran : 10.00 waktu server (sesuai WIB)  
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA  
Jl. KRT Pringgodingrat No.1 Beran, Sleman

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**  
1. Calon Peserta Lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.  
2. Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran secara tertutup (Closed bidding) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.  
3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.  
4. Jaminan Penawaran Lelang :  
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).  
b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.  
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim kembali-kali.  
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenai sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.  
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodingrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jkt. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 20 April 2021

**PANITERA**  
**PENGADILAN NEGERI SLEMAN**  
RIPWAN NURDIN, SH.  
NIP. 19681011 199003 1 001